



KATALOG BPS : 7103002.36

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2011-2012



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI BANTEN**

STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Financial Statistic of Regency/Municipality Government

PROVINSI BANTEN

2011 – 2012

<http://banten.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

**STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BANTEN
2011 – 2012**

No Publikasi : 36540.1204
Katalog BPS : 7203003.36

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : iii + 42 Halaman

Naskah
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit
Bidang Statistik Distribusi

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

“Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya”

**STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BANTEN 2011 – 2012**

Anggota Tim Penyusun :

Koordinator : Junjung Nuraharto, S.Si

Editor : Suwandari, S.ST

Penulis/Pengolah Data : Mabrur Ams.

<http://banon.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2011 – 2012 diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen data akan data statistik keuangan daerah. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data realisasi pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tahun 2011 dan 2012. Data tersebut merupakan hasil kompilasi data yang diterima dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui BPS daerah.

Dalam publikasi ini disertakan pula penjelasan tentang konsep definisi dan metode pengumpulan data guna mempermudah pemahaman para pengguna data. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para konsumen data, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi yang akan datang.

Serang, Oktober 2013

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Banten,



Dr. Syech Suhaimi, SE, M.Si.
NIP. 19620108 198703 1 002

DAFTAR ISI/CONTENS

	Halaman Page
KATA PENGANTAR/PREFACE	i
DAFTAR ISI/CONTENS	ii
PENJELASAN UMUM/GENERAL EXPLANATION	1
ULASAN RINGKAS/BRIEF DESCRIPTION	12
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	
1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemda Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota / <i>Actual Income and Expenditure Of Regency/Municipality Government Throughout Province Banten By Regency/Municipality</i>	23
2.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten/ <i>Actual Receipt of Regency/Municipality Government Provincial of Banten</i>	25
2.2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten/ <i>Actual Expenditure of Regency/Municipality Government Provincial of Banten</i>	26
2.1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang/ <i>Actual Receipt Government of Regency Pandeglang</i>	27
2.2.1 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang/ <i>Actual Expenditure Government of Regency Pandeglang</i>	28
2.1.2 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak/ <i>Actual Receipt Government of Regency Lebak</i>	29
2.2.2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak/ <i>Actual Expenditure Government of Regency Lebak</i>	30
2.1.3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang/ <i>Actual Receipt Government of Regency Tangerang</i>	31
2.2.3 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang/ <i>Actual Expenditure Government of Regency Tangerang</i>	32
2.1.4 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang/ <i>Actual Receipt Government of Regency Serang</i>	33
2.2.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Serang/ <i>Actual Expenditure Government of Regency Serang</i>	34

2.1.5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Tangerang/ <i>Actual Receipt Government of Municipality Tangerang</i>	35
2.2.5	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Tangerang/ <i>Actual Expenditure Government of Municipality Tangerang.....</i>	36
2.1.6	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Cilegon/ <i>Actual Receipt Government of Municipality Cilegon</i>	37
2.2.6	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Cilegon/ <i>Actual Expenditure Government of Municipality Cilegon.....</i>	38
2.1.7	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Serang/ <i>Actual Receipt Government of Municipality Serang</i>	39
2.2.7	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Serang/ <i>Actual Expenditure Government of Municipality Serang</i>	40
2.1.8	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan/ <i>Actual Receipt Government of Municipality Tangerang Selatan</i>	41
2.2.8	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan/ <i>Actual Expenditure Government of Municipality Tangerang Selatan.....</i>	42

<http://banter.ppsip.10>

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diterbitkan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten secara rutin setiap tahun. Publikasi tahun ini menyajikan data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Publikasi ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan terhadap data keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota terutama untuk melihat potensi daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran yang bisa digunakan untuk membuat kebijakan yang rinci dan tepat sasaran.

I.2. Ruang Lingkup Survei

Data realisasi pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dikumpulkan dari Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota di tiap-tiap kabupaten/kota seluruh Provinsi Banten.

I.3. Konsep dan Definisi

Daftar isian realisasi keuangan daerah kabupaten/kota (K-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan menyangkut realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan keuangan kabupaten/kota yang sudah baku sesuai dengan Permendagri No 13. Berikut ini beberapa penjelasan konsep dan definisi dalam daftar isian K-2.

I.3.1. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah dalam struktur laporan keuangan kabupaten/kota, secara umum terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1. Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian gol C, parkir dan lain-lain.

1.2. Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, biaya KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga dan sejenisnya. Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek dan lain-lain.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan, dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

2.1. Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi, pungutan penguasaan perikanan dan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

1.3.2. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja tak langsung.
2. Belanja langsung.

1. Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

1.1. Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk di sini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

1.2. Belanja Bunga

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

1.3. Belanja Subsidi

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga

tertentu, agar harga jual produksi barang / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

1.4. Belanja Hibah

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah / BUMN / BUMD, badan / lembaga / organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

1.5. Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi.
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten / kota.
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.

- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah / pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa lainnya.

1.8. Belanja Tidak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

2.1. Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.2. Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

2.3. Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai

manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan asset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

1.2 Pencairan Dana Cadangan

Adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adalah semua penjualan asset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal / investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Saham, penanaman modal pada BUMN / BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

2.3. Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

2.4. Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau pihak ketiga.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

<http://banten.bps.go.id>

II. ULASAN RINGKAS

II.1. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 dan 2012 merupakan gambaran langkah kongkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian di daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2012 berdasarkan perhitungan Produk Domestik Bruto yaitu 6,15 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar 6,39 persen, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 mengalami sedikit perlambatan. Namun demikian laju pertumbuhan ekonomi provinsi tidak berarti terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan publik di daerah karena tidak ada imbas secara langsung laju pertumbuhan ekonomi provinsi terhadap APBD.

Secara empiris dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi bisa berfluktuasi naik dan turun, sedangkan APBD cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melihat secara cermat belanja publiknya sehingga tepat sasaran.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan belanja pemerintah. Untuk mengimbangnya, pemerintah mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD harus dapat dikelola pemerintah daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah sehingga dalam upaya penggalan sumber pendapatannya pemerintah tidak mendistorsi perekonomian. Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan

pelayanan yang lebih baik, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel a
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Rincian	2011	2012	Perubahan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENERIMAAN DAERAH	11,773,882,661	14,506,476,456	23.21
Pendapatan Daerah	10,848,615,831	12,500,455,957	15.23
1 Pendapatan Asli Daerah	2,246,277,774	2,875,496,504	28.01
2 Dana Perimbangan	5,816,208,819	7,155,426,256	23.03
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	2,786,129,238	2,469,533,197	(11.36)
Pembiayaan Daerah	925,266,831	2,006,020,500	116.80
B. PENGELUARAN DAERAH	11,773,882,661	14,506,476,456	23.21
Belanja Tidak Tangsung	5,121,290,913	5,653,810,332	10.40
1 Belanja Pegawai	4,527,786,636	5,143,959,702	13.61
2 Belanja Bunga	1,378,289	77,778	(94.36)
3 Belanja Subsidi	7,654,895	-	-
4 Belanja Hibah	320,648,772	300,425,377	(6.31)
5 Belanja Bantuan Sosial	132,176,778	73,012,274	(44.76)
6 Belanja Bagi Hasil	21,075,426	22,683,310	7.63
7 Belanja Bantuan Keuangan	79,166,868	100,434,847	26.86
8 Pengeluaran Tidak Terduga	31,403,250	13,217,044	(57.91)
Belanja Langsung	4,899,495,043	6,310,837,035	28.81
1 Belanja Pegawai	685,454,855	723,998,224	5.62
2 Belanja Barang dan Jasa	2,068,667,852	2,478,422,592	19.81
3 Belanja Modal	2,145,372,336	3,108,416,220	44.89
Pembiayaan Daerah	1,753,096,704	2,541,829,090	44.99

Sumber penerimaan yang masih menjadi sumber utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah adalah dana alokasi umum (DAU). Dana transfer pemerintah pusat ini memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah. Sumber keuangan dari pemerintah daerah yang lain adalah lain-lain pendapatan yang sah, pajak daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dana alokasi khusus (DAK), serta hasil perusahaan milik daerah.

Penerimaan daerah sesuai dengan struktur laporan keuangan terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Penerimaan daerah dalam realisasi tahun

2012 mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah Tahun 2011, dari 11.773,88 miliar rupiah pada Tahun 2011 menjadi 14.506,48 miliar rupiah pada Tahun 2012 atau naik 23,21 persen. Dari sisi pendapatan daerah, terlihat adanya peningkatan sebesar 15,23 persen, yaitu dari 10.848,62 miliar rupiah pada Tahun 2011 meningkat menjadi 12.500,46 miliar rupiah pada Tahun 2012. Peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2012 secara agregat sebesar 1.651,84 miliar rupiah, yang dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan asli daerah, namun dana perimbangan dari pemerintah provinsi maupun pusat masih lebih mendominasi. Secara empiris, dapat ditunjukkan kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 629,22 miliar rupiah atau naik 28,01 persen. Sementara lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan dari 2.786,13 miliar rupiah pada Tahun 2011 menjadi 2.469,53 miliar rupiah pada Tahun 2012 atau turun 11,36 persen. Walaupun pendapatan asli daerah mengalami kenaikan, namun belum secara signifikan menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak Tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Sebelumnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam APBN diwujudkan melalui alokasi pengeluaran transfer ke daerah berupa subsidi daerah otonom (SDO) dan anggaran bantuan pembangunan pusat dalam bentuk inpres. Dana perimbangan dari pemerintah pusat mengalami kenaikan dari 5.816,21 miliar rupiah pada tahun 2011 menjadi 7.155,43 miliar rupiah pada Tahun 2012, atau naik sebesar 23,03 persen. Dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat maupun provinsi cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan dampak pemekaran yang memerlukan dana operasional untuk prasarana pembangunan, dan di sisi lain daerah induk dana perimbangannya tidak mengalami penurunan yang berarti.

Mulai Tahun 2007, struktur belanja pemerintah daerah berubah bukan lagi belanja publik dan aparatur, tetapi mejadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaan belanja langsung dan tak langsung terletak pada kaitan anggaran belanja dengan pelaksanaan program. Jika belanja tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program maka masuk sebagai belanja tak langsung. Sebaliknya jika belanja terkait langsung dengan pelaksanaan program maka masuk pada belanja langsung. Berdasarkan struktur yang baru ini, pada Tahun 2012 terjadi kenaikan dari

Tahun 2011 yaitu pada belanja langsung sebesar 1.411,34 miliar rupiah atau naik 28,81 persen dan belanja tidak langsung sebesar 532,52 miliar rupiah atau naik 10,40 persen.

II.2. Penerimaan Daerah

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. *Pertama*, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Kedua*, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, yang terdiri dari : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. *Ketiga*, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat. *Keempat*, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Jika dilihat dari pendapatan daerah, bahwa realisasi pendapatan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota Tahun 2012 tampak meningkat dari realisasi pendapatan Tahun 2011, Peningkatan realisasi pendapatan yang signifikan terjadi pada pendapatan asli daerah, walaupun pendapatan daerah masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

II.2.1. Pendapatan Daerah

II.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian kabupaten/kota dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah

memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta

Tabel b
Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten
Menurut Jenis Penerimaan
2011 - 2012

Jenis Penerimaan	2011	2012
(1)	(2)	(3)
PENERIMAAN	100.00	100.00
Pendapatan Daerah	92.14	86.17
1. Pendapatan Asli Daerah	19.08	19.82
1.1 Pajak daerah	13.05	12.98
1.2 Retribusi Daerah	2.88	2.31
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.49	0.35
1.4 Lain-lain PAD yang sah	2.65	4.18
2. Dana Perimbangan	49.40	49.33
2.1 Bagi Hasil Pajak	8.03	7.58
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0.10	0.51
2.3 Dana Alokasi Umum	37.87	38.30
2.4 Dana Alokasi Khusus	3.40	2.92
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.66	17.02
Pembiayaan Daerah	7.86	13.83

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 terhadap total penerimaan daerah mengalami peningkatan dibanding Tahun 2011 yaitu dari 19,08 persen menjadi 19,82 persen. Demikian juga jika dilihat dari nilai nominalnya PAD mengalami peningkatan yaitu dari 2.246,28 miliar rupiah pada Tahun 2011 menjadi 2.875,50 miliar rupiah pada Tahun 2012 atau naik sebesar 28,01 persen. Sumber utama PAD tahun 2012 adalah pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah, dengan kontribusinya masing-masing sebesar 12,98 persen dan 4,18 persen terhadap total penerimaan. Selain itu, pendapatan retribusi daerah dan lainnya juga menyumbang kontribusi sebesar 2.66 persen pada tahun

2012. Komposisi ini agak berbeda dengan sumber PAD Tahun 2011 dimana pada Tahun 2011 sumber utama PAD adalah pajak dan retribusi daerah.

II.2.1.2. Dana Perimbangan

Dari tabel b dapat dilihat bahwa penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota kontribusi terbesarnya disumbang dari dana perimbangan, dimana realisasi 2012 kontribusinya sebesar 49,33 persen dari total penerimaan. Komponen terbesarnya adalah DAU yaitu sebesar 38,30 persen dengan nilai nominal sebesar 5.556,44 miliar rupiah pada Tahun 2012. Besarnya DAU yang ditransfer ke daerah tersebut merupakan upaya pemerintah mengurangi atau memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah yang selama ini masih terjadi. Besarnya DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri bersih setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK. Komponen berikutnya yang memberikan sumbangan terbesar kedua setelah DAU adalah bagi hasil pajak yaitu sebesar 7,58 persen dengan nilai sebesar 1.100,23 miliar rupiah. Kontribusi DAU pada tahun 2012 baik dari nilai nominal maupun persentase terhadap total penerimaan, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2011. Demikian juga bagi hasil pajak baik secara persentase maupun nilai nominalnya mengalami peningkatan. Komponen DAK memberikan kontribusi sebesar 2,92 persen, sedangkan yang menyumbang kontribusi terkecil dalam dana perimbangan adalah bagi hasil bukan pajak yaitu sebesar 0,51 persen.

II.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah pada realisasi Tahun 2012 memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan dari 2.786,13 miliar pada Tahun 2011 menjadi 2.469,53 miliar rupiah pada Tahun 2012 atau turun sebesar 11,36 persen. Penurunan pendapatan ini juga menurunkan

kontribusinya terhadap total penerimaan dari 23,66 persen pada Tahun 2011 menjadi 17,02 persen pada Tahun 2012. Penerimaan lainya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau *crisis solvability* ditambah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

II.2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan daerah pada realisasi Tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan pada realisasi Tahun 2011 yaitu sebesar 925,27 miliar rupiah pada Tahun 2011 menjadi 2.006,02 miliar rupiah pada Tahun 2012 atau naik 116,80 persen. Dengan peningkatan baik secara nominal maupun persentase pada Tahun 2012, maka kontribusi penerimaan pembiayaan terhadap total penerimaan daerah juga mengalami peningkatan dari 7,86 persen pada Tahun 2011 menjadi 13,83 persen pada Tahun 2012.

II.3. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja tak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja tak langsung meliputi bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak tersangka. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Seperti halnya total penerimaan daerah pada realisasi Tahun 2012, total pengeluaran juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012 naik sebesar 23,21 persen dibanding Tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja tak langsung yang meningkat dari 5.121,29 miliar rupiah pada Tahun 2011 menjadi 5.653,81 miliar rupiah pada Tahun 2012 atau naik sebesar 10,40 persen. Begitu juga belanja langsung mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 4.899,50 miliar rupiah pada Tahun 2011 menjadi 6.310,84 miliar rupiah pada Tahun 2012 atau naik sebesar 28,81 persen. Pada pembiayaan daerah juga mengalami peningkatan sebesar 44,99 persen yaitu dari 1.753,10 miliar rupiah pada Tahun 2011 menjadi 2.541,83 miliar rupiah pada Tahun 2012. Peningkatan pembiayaan ini terjadi karena pada realisasi Tahun 2012 mengalami penurunan pengeluaran pada beberapa pos belanja tak langsung, sehingga pada realisasi Tahun 2012 mengalami sisa lebih perhitungan anggaran yang berpengaruh pada pengeluaran pembiayaan daerah menjadi naik.

Dilihat dari kontribusinya, belanja langsung memiliki kontribusi terbesar terhadap pengeluaran daerah, pada Tahun 2012 terjadi peningkatan dari Tahun 2011 yaitu sebesar 41,61 persen pada tahun 2011 menjadi 43,50 persen pada Tahun 2012, persentase peningkatan yang relatif kecil ini berarti *share* belanja langsung kurang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi belanja tidak langsung pada Tahun 2012 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2011 sebesar 43,50 persen menjadi 38,97 persen pada Tahun 2012. Persentase realisasi belanja baik langsung maupun tidak langsung selalu lebih kecil dibandingkan anggarannya, oleh karenanya kontribusi pembiayaan menjadi naik dalam realisasinya.

II.3.1. Belanja Tak Langsung

Dari sisi belanja tak langsung, terlihat bahwa distribusi persentase belanja pegawai menyumbangkan peranan yang paling besar terhadap total pengeluaran daerah yaitu sebesar 35,46 persen pada realisasi Tahun 2012, dengan nilai nominal sebesar 4.527,79 miliar rupiah pada Tahun 2011 menjadi 5.143,96 miliar rupiah pada Tahun 2012 atau mengalami kenaikan 13,61 persen dibandingkan Tahun 2011. Sementara distribusi persentase belanja pegawai terhadap

total pengeluaran daerah pada realisasi Tahun 2011 sebesar 35,46 persen. Kontribusi terbesar pada Tahun 2012 setelah belanja pegawai berturut-turut adalah belanja hibah, belanja bantuan keuangan, dan belanja bantuan sosial masing-masing sebesar 2,07 persen, 0,69 persen, dan 0,50 persen. Sementara kontribusi terbesar pada tahun 2011 setelah belanja pegawai urutannya sama yaitu belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan masing-masing sebesar 2,72 persen, 1,12 persen dan 0,67 persen.

Tabel c
Distribusi Persentase Realisasi Pengeluaran
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten
Menurut Jenis Pengeluaran
2011 - 2012

Jenis Pengeluaran	2011	2012
(1)	(2)	(3)
PENGELUARAN	100.00	100.00
Belanja Tidak Langsung	43.50	38,97
1 Belanja Pegawai	38.46	35,46
2 Belanja Bunga	0.01	0,001
3 Belanja Subsidi	0.07	-
4 Belanja Hibah	2.72	2.07
5 Belanja Bantuan Sosial	1.12	0.50
6 Belanja Bagi Hasil	0.18	0.16
7 Belanja Bantuan Keuangan	0.67	0.69
8 Pengeluaran Tidak Terduga	0.27	0.09
Belanja Langsung	41.61	43.50
1 Belanja Pegawai	5.82	4,99
2 Belanja Barang dan Jasa	17.57	17,08
3 Belanja Modal	18.22	21,43
Pembiayaan Daerah	14.89	17.52

II.3.2. Belanja Langsung

Berbeda dengan belanja tak langsung, pada belanja langsung terlihat bahwa distribusi persentase belanja modal menyumbangkan peranan yang paling besar terhadap total pengeluaran daerah yaitu sebesar 21,43 persen pada Tahun 2012, dengan nilai nominal sebesar 2.145,37 miliar rupiah pada tahun 2011 menjadi 3.108,42 miliar rupiah

pada Tahun 2012 yang berarti naik 44,89. Sedangkan kontribusi terbesar setelah belanja modal berturut-turut adalah belanja barang dan jasa serta belanja pegawai masing-masing 17,08 persen dan 4,99 persen pada Tahun 2012, dengan kenaikan masing-masing sebesar 19,81 persen dan 5,62 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Jika diperhatikan dari angka nominalnya, seluruh jenis belanja langsung mengalami kenaikan, dan yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah belanja modal.

II.3.3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah bersumber dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 44,99 persen atau naik dari 1.753,10 miliar rupiah pada realisasi Tahun 2011 menjadi 2.541,83 miliar rupiah pada Tahun 2012. Dengan peningkatan baik secara nominal maupun persentase pada Tahun 2012, maka kontribusi pengeluaran pembiayaan terhadap total pengeluaran daerah juga mengalami peningkatan dari 14,89 persen pada Tahun 2011 menjadi 17,52 persen pada Tahun 2012.

II.4. Kesimpulan

Laju pertumbuhan realisasi penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota bukan hanya semata-mata disebabkan oleh laju pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian pemerintah daerah tetap berusaha lebih menekankan komponen PAD dibandingkan komponen lainnya untuk lebih memperkuat kemandirian pemerintah daerah tersebut dalam memacu pertumbuhan pendapatan daerah.

Kontribusi terbesar dari struktur penerimaan daerah adalah pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana alokasi umum (DAU) yang digunakan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung. Meskipun demikian pada realisasi Tahun 2012 kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah kabupaten/kota mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah kabupaten/kota. *Pertama*, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal atau berada di luar wewenang pemerintah daerah tersebut. *Kedua*, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara optimal, hal ini tercermat dari laba bersih yang dihasilkan jika dilihat dari struktur biaya, asset dan penjualannya. *Ketiga*, rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat, tercermin dari pendapatan perkapita. *Keempat*, kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Pada realisasi Tahun 2012 peranan belanja daerah didominasi oleh belanja langsung dimana belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Dalam struktur pengeluaran daerah, belanja langsung menyumbangkan peranan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peranan belanja tak langsung dengan kontribusi 43,50 persen pada Tahun 2012 terhadap total pengeluaran daerah, mengalami peningkatan dibanding kontribusi Tahun 2011, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada Tahun 2012 ada peningkatan.

Di sisi belanja pegawai masih menempati urutan tertinggi dari belanja tak langsung atau dari seluruh belanja daerah dengan kontribusi sebesar 35,46 persen, hal ini dimungkinkan karena adanya kenaikan gaji pegawai pada Tahun 2012. Kondisi seperti ini juga harusnya diikuti dengan peningkatan pelayanan publik.

TABEL 1 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMDA KABUPATEN/KOTA
TABLE 1 SELURUH PROVINSI BANTEN MENURUT KABUPATEN KOTA
ACTUAL INCOME AND EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
THROUGHOUT PROVINCE BANTEN BY REGENCY/MUNICIPALITY
TAHUN 2011 DAN 2012
 (Ribu rupiah/thousand rupiahs)

No .	Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pendapatan <i>Income</i>	Pembiayaan <i>Financing</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahun 2011				-
1	Kab Pandeglang	1,220,616,366	41,800,884	1,262,417,250
2	Kab. Lebak	1,185,100,258	102,570,480	1,287,670,738
3	Kab. Tangerang	2,224,307,764	299,061,122	2,523,368,886
4	Kab. Serang	1,322,429,274	117,097,490	1,439,526,764
5	Kota Tangerang	1,839,864,606	294,904,799	2,134,769,405
6	Kota Cilegon	858,320,973	21,485,232	879,806,205
7	Kota Serang	702,985,618	48,346,824	751,332,443
8	Kota Tangerang Selatan	1,494,990,970	-	1,494,990,970
Jumlah/Total		10,848,615,831	925,266,831	11,773,882,661
Tahun 2012				-
1	Kab Pandeglang	1,345,730,832	82,870,401	1,428,601,233
2	Kab. Lebak	1,292,072,655	95,823,904	1,387,896,558
3	Kab. Tangerang	2,655,125,355	550,748,810	3,205,874,166
4	Kab. Serang	1,488,016,015	260,918,542	1,748,934,557
5	Kota Tangerang	2,188,913,826	481,618,629	2,670,532,454
6	Kota Cilegon	1,057,973,904	57,967,451	1,115,941,355
7	Kota Serang	770,744,326	45,307,638	816,051,965
8	Kota Tangerang Selatan	1,701,879,044	430,765,125	2,132,644,168
Jumlah/Total		12,500,455,957	2,006,020,500	14,506,476,456

TABEL 1 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMDA KABUPATEN/KOTA
TABLE 1 SELURUH PROVINSI BANTEN MENURUT KABUPATEN KOTA
(lanj.) *ACTUAL INCOME AND EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT*
THROUGHOUT PROVINCE BANTEN BY REGENCY/MUNICIPALITY
TAHUN 2011 DAN 2012
(Ribu rupiah/thousand rupiahs)

No .	Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Belanja <i>Expenditure</i>	Pembiayaan <i>Financing</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
Tahun 2011				
1	Kab Pandeglang	1,177,381,267	85,035,983	1,262,417,250
2	Kab. Lebak	1,172,548,485	115,122,253	1,287,670,738
3	Kab. Tangerang	2,027,969,741	495,399,145	2,523,368,886
4	Kab. Serang	1,173,463,518	266,063,246	1,439,526,764
5	Kota Tangerang	1,635,673,957	499,095,448	2,134,769,405
6	Kota Cilegon	839,872,748	39,933,457	879,806,205
7	Kota Serang	704,437,307	46,895,136	751,332,443
8	Kota Tangerang Selatan	1,289,438,935	205,552,036	1,494,990,970
Jumlah/Total		10,020,785,957	1,753,096,704	11,773,882,661
Tahun 2012				
1	Kab Pandeglang	1,266,816,384	161,784,848	1,428,601,233
2	Kab. Lebak	1,274,592,541	113,304,018	1,387,896,558
3	Kab. Tangerang	1,413,896,049	496,486,145	1,910,382,194
4	Kab. Serang	2,709,388,021	335,038,508	3,044,426,529
5	Kota Tangerang	1,925,246,115	745,286,339	2,670,532,454
6	Kota Cilegon	876,685,869	239,255,486	1,115,941,355
7	Kota Serang	754,832,411	61,219,553	816,051,965
8	Kota Tangerang Selatan	1,743,189,976	389,454,193	2,132,644,168
Jumlah/Total		11,964,647,366	2,541,829,090	14,506,476,456

TABEL
TABLE 2.1

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Jenis Penerimaan		2011	2012
<i>Receipt items</i>			
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH	10,848,615,831	12,500,455,957
	LOCAL GOVERNMENT RECEIPT		
1.	Pendapatan Asli Daerah	2,246,277,774	2,875,496,504
	<i>Local Government Original Receipt</i>		
1.1.	Pajak daerah	1,537,061,301	1,883,534,078
	<i>Local Taxes</i>		
1.2.	Retribusi Daerah	339,557,249	334,915,357
	<i>Local Retributions</i>		
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	58,028,404	50,964,723
	<i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>		
1.4.	Lain-lain PAD yang sah	311,630,820	606,082,346
	<i>Other Local Government Original Receipt</i>		
2.	Dana Perimbangan	5,816,208,819	7,155,426,256
	<i>Balanced Budget</i>		
2.1.	Bagi Hasil Pajak	945,917,701	1,100,234,794
	<i>Tax Share</i>		
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	11,476,499	74,562,579
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		
2.3.	Dana Alokasi Umum	4,459,049,769	5,556,435,042
	<i>General Allocation Funds</i>		
2.4.	Dana Alokasi Khusus	399,764,850	424,193,840
	<i>Special Allocation Funds</i>		
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2,786,129,238	2,469,533,197
	<i>Other Receipt</i>		
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	925,266,831	2,006,020,500
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH / TOTAL		11,773,882,661	14,506,476,456

TABEL
TABLE 2.2

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	5,121,290,913	5,653,810,332
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	4,527,786,636	5,143,959,702
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	1,378,289	77,778
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	7,654,895	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	320,648,772	300,425,377
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	132,176,778	73,012,274
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	21,075,426	22,683,310
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	79,166,868	100,434,847
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	31,403,250	13,217,044
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	4,899,495,043	6,310,837,035
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	685,454,855	723,998,224
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	2,068,667,852	2,478,422,592
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	2,145,372,336	3,108,416,220
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	1,753,096,704	2,541,829,090
JUMLAH / TOTAL		11,773,882,661	14,506,476,456

TABEL
TABLE

2.1.1

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Pandeglang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	1,220,616,366	1,345,730,832
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	56,179,198	54,048,394
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	6,610,547	8,135,008
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	39,085,682	11,404,618
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	6,442,034	6,627,404
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	4,040,935	27,881,364
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	870,685,657	1,057,315,528
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	49,940,070	64,606,978
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	4,981,046	7,055,558
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	723,981,841	880,790,323
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	91,782,700	104,862,670
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	293,751,512	234,366,910
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	41,800,884	82,870,401
JUMLAH / TOTAL		1,262,417,250	1,428,601,233

TABEL
TABLE 2.2.1

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Pandeglang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	840,086,051	868,145,392
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	787,051,268	824,225,954
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	26,784	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	31,207,237	12,132,695
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	3,304,590	1,911,748
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	8,414,318	6,383,025
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	9,906,855	22,559,347
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	175,000	932,624
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	337,295,216	398,670,992
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	-	52,560,663
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	168,929,873	205,150,247
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	168,365,344	140,960,082
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	85,035,983	161,784,848
JUMLAH / TOTAL		1,262,417,250	1,428,601,233

TABEL
TABLE 2.1.2

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Lebak

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	1,185,100,258	1,225,611,405
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	93,065,059	127,295,426
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	14,041,078	22,667,691
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	66,815,311	91,952,016
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	3,123,407	3,157,065
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	9,085,263	9,518,654
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	859,990,345	873,401,273
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	50,575,995	8,336,534
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	854,169	60,942,346
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	737,431,881	804,122,393
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	71,128,300	66 461 250
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	232,044,855	224,914,705
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	102,570,480	95,823,904
JUMLAH / TOTAL		1,287,670,738	1,321,435,308

TABEL
TABLE 2.2.2

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Lebak

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	649,960,447	747,452,328
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	592,784,547	691,987,890
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	1,351,505	77,778
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	23,329,238	26,302,136
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	13,655,670	7,008,228
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	12,661,108	16,300,285
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	1,061,058	1,061,057
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	5,117,322	4,714,954
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	522,588,037	527,140,212
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	30,680,564	39,159,492
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	244,263,466	212,567,688
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	247,644,007	275,413,033
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	115,122,253	113,304,018
JUMLAH / TOTAL		1,287,670,738	1,387,896,558

TABEL
TABLE 2.1.3

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Tangerang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	2,224,307,764	2,655,125,355
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	665,231,223	839,867,524
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	426,863,508	535,855,875
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	62,162,552	67,130,842
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	17,263,891	17,668,545
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	158,941,272	219,212,262
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	989,210,733	1,377,789,345
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	216,287,759	274,747,431
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	906,082	1,312,935
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	720,492,542	1,016,902,729
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	51,524,350	84,826,250
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	569,865,808	437,468,486
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	299,061,122	550,748,810
JUMLAH / TOTAL		2,523,368,886	3,205,874,166

TABEL
TABLE 2.2.3

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Tangerang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	914,761,028	1,129,342,384
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	780,760,800	892,026,315
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	65,776,053	165,868,759
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	19,588,048	25,348,990
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	35,525,228	40,541,228
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	13,110,899	5,557,092
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	1,113,208,713	1,580,045,637
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	134,582,876	130,110,873
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	498,534,653	519,547,940
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	480,091,184	930,386,823
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	495,399,145	496,486,145
JUMLAH / TOTAL		2,523,368,886	3,205,874,166

TABEL
TABLE 2.1.4

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Serang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	1,322,429,274	1,488,016,015
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	216,956,155	253,775,086
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	91,194,949	124,238,782
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	83,093,037	20,220,203
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	8,611,546	8,813,395
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	34,051,623	100,502,705
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	773,980,563	945,460,262
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	79,146,663	93,959,748
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	906,083	1,312,935
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	629,377,817	785,474,329
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	64,550,000	64,713,250
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	331,492,556	288,780,667
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	117,097,490	260,918,542
JUMLAH / TOTAL		1,439,526,764	1,748,934,557

TABEL
TABLE 2.2.4

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kabupaten/Regency : Serang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	691,117,194	806,290,575
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	626,138,190	737,055,766
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	11,488,859	24,197,839
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	31,932,018	20,452,018
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	13,662,473	24,495,901
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	7,895,654	89,050
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	482,346,324	607,605,475
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	102,252,046	47,139,743
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	234,812,451	268,541,129
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	145,281,827	291,924,603
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	266,063,246	335,038,508
JUMLAH / TOTAL		1,439,526,764	1,748,934,557

TABEL
TABLE 2.1.5

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2011 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Tangerang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	1,839,864,606	2,188,913,826
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	499,080,751	631,519,354
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	418,009,723	516,467,797
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	39,610,720	60,374,379
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	12,515,469	7,407,590
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	28,944,839	47,269,588
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	819,401,102	1,069,716,223
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	252,820,944	313,856,063
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	906,082	1,312,935
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	554,055,976	747,696,465
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	11,618,100	6,850,760
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	521,382,753	487,678,249
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	294,904,799	481,618,629
JUMLAH / TOTAL		2,134,769,405	2,670,532,454

TABEL
TABLE 2.2.5

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Tangerang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	717,932,743	815,995,553
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	649,560,943	782,092,431
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	41,061,725	32,108,000
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	22,709,900	487,500
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	954,550	954,550
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3,645,625	353,071
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	917,741,214	1,109,250,562
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	280,290,653	184,907,823
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	313,745,346	494,216,415
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	323,705,215	430,126,324
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	499,095,448	745,286,339
JUMLAH / TOTAL		2,134,769,405	2,670,532,454

TABEL
TABLE 2.1.6

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Cilegon

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	858,320,973	1,057,973,904
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	253,212,005	334,018,043
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	172,965,160	147,686,643
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	15,473,857	11,021,838
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	10,072,057	7,290,723
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	54,700,930	168,018,840
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	417,147,321	516,908,673
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	96,801,598	109,682,480
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	906,083	1,312,935
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	315,485,240	405,584,438
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	3,954,400	328,820
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	187,961,647	207,047,187
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	21,485,232	57,967,451
JUMLAH / TOTAL		879,806,205	1,115,941,355

TABEL
TABLE 2.2.6

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Cilegon

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	494,769,448	425,342,920
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	406,871,999	402,031,819
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	7,654,895	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	54,729,254	10,992,800
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	23,385,002	11,610,890
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	669,547	606,224
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1,458,750	101,188
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	345,103,300	451,342,949
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	-	78,735,697
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	183,388,215	195,660,989
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	161,715,084	176,946,263
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	39,933,457	239,255,486
JUMLAH / TOTAL		879,806,205	1,115,941,355

TABEL
TABLE 2.1.7

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Serang

Jenis Penerimaan <i>Receipt items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT RECEIPT	702,985,618	770,744,326
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	41,890,335	58,667,906
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	28,955,917	41,118,137
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	7,326,935	7,666,801
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	-	-
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	5,607,482	9,882,968
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	450,999,173	538,328,650
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	36,944,257	45,003,277
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1,132,416	1,312,935
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	365,683,500	442,554,608
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	47,239,000	49,457,830
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	210,096,111	173,747,770
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	48,346,824	389,408,097
JUMLAH / TOTAL		751,332,443	1,160,152,424

TABEL
TABLE 2.2.7

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Serang

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	337,818,008	389,408,097
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	315,153,822	369,714,381
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	8,811,838	9,214,249
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	5,039,350	1,135,000
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	8,812,998	9,108,436
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	-	236,032
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	366,619,299	451,342,949
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	47,866,858	78,735,697
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	122,698,223	195,660,989
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	196,054,218	176,946,263
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	46,895,136	61,219,553
JUMLAH / TOTAL		751,332,443	901,970,600

TABEL
TABLE 2.1.8

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Tangerang Selatan

Jenis Penerimaan		2011	2012
<i>Receipt items</i>			
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1,494,990,970	1,701,879,044
	LOCAL GOVERNMENT RECEIPT		
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Government Original Receipt</i>	420,663,049	576,304,771
1.1.	Pajak daerah <i>Local Taxes</i>	378,420,418	487,364,145
1.2.	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	25,984,155	65,144,660
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan <i>Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	-	-
1.4.	Lain-lain PAD yang sah <i>Other Local Government Original Receipt</i>	16,258,475	23,795,966
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	634,793,926	710,045,050
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	163,400,415	190,042,283
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	884,538	-
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	412,540,972	473,309,757
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	57,968,000	46,693,010
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Receipt</i>	439,533,996	415,529,223
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	-	430,765,125
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH / TOTAL		1,494,990,970	2,132,644,168

TABEL
TABLE 2.2.8

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL EXPENDITURE OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT
PROVINSI BANTEN
2011 - 2012
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

Kota/Municipality : Tangerang Selatan

Jenis Pengeluaran <i>Expenditure items</i>		2011	2012
(1)		(2)	(3)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE	474,845,994	471,833,082
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	369,465,067	444,825,146
2	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	-	-
3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-
4	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	84,244,568	19,608,900
5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	12,562,200	5,057,900
6	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	8,574,159	1,108,103
8	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	-	1,233,033
B.	BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE	814,592,940	1,271,356,894
1	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	89,781,858	144,875,497
2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	302,295,626	434,834,543
3	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	422,515,457	691,646,854
C.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	205,552,036	389,454,193
JUMLAH / TOTAL		1,494,990,970	2,132,644,168

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK - PROVINSI BANTEN

Komplek Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Raya Palima Kav. H 1-2, Pakupatan Serang 42171

E-mail : bps3600@bps.go.id Website : <http://banten.bps.go.id>